

PERAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENYELESAIKAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Heru Dwi Susanto, Joni Emirzon, Suci Flambonita

Universitas Sriwijaya

hdsusanto@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), yang sering kali menghadapi hambatan teknis dan prosedural meskipun putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Hambatan utama dalam eksekusi putusan PHI adalah rendahnya kepatuhan pengusaha terhadap putusan serta proses eksekusi yang memerlukan biaya tinggi dan waktu yang lama. Pengadilan Niaga, dengan prosedur yang lebih efisien, dapat menjadi alternatif untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, terutama dalam kasus perusahaan yang menghadapi masalah keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum eksekusi putusan PHI melalui Pengadilan Niaga dan memberikan rekomendasi terkait perbaikan sistem hukum yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan sejarah, yang menghasilkan kesimpulan bahwa penggunaan Pengadilan Niaga dapat meningkatkan efisiensi eksekusi dan memberikan kepastian hukum. Disarankan agar terdapat sinergi yang lebih kuat antara hukum hubungan industrial dan hukum niaga, serta pembaruan regulasi yang mendukung implementasi eksekusi yang lebih adil dan efisien.

Kata Kunci: Pengadilan Niaga, Eksekusi Putusan, Pengadilan Hubungan Industrial, Kepastian Hukum, Kepailitan.

ABSTRACT:

This study examines the role of the Commercial Court in executing decisions from the Industrial Relations Court (PHI), which often face technical and procedural obstacles despite having permanent legal force. The main barriers to the execution of PHI decisions are the low level of compliance by employers with the decisions and the high costs and lengthy time required for the execution process. The Commercial Court, with its more efficient procedures, can serve as an alternative to address these barriers, especially in cases involving companies facing financial difficulties. This research aims to analyze the legal construction of executing PHI decisions through the Commercial Court and provide recommendations for improving the existing legal system. The research method used is normative legal research with approaches based on legislation, case law, and historical analysis, which leads to the conclusion that the use of the Commercial Court can improve execution efficiency and provide legal certainty. It is recommended that there be stronger synergy between industrial relations law and commercial law, as well as regulatory updates to support the implementation of fairer and more efficient executions.

Keywords: Commercial Court, Execution of Decisions, Industrial Relations Court, Legal Certainty, Bankruptcy.

A. Pendahuluan

Salah satu isu penting dibidang ketenagakerjaan ialah penyelesaian sengketa hubungan industrial yang berfungsi untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dibentuk untuk menangani sengketa antara kedua pihak, dengan tujuan memastikan hak-hak pekerja terlindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹. Meskipun PHI memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan sengketa, masalah utama yang sering muncul adalah kesulitan dalam mengeksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ketidakjelasan penegakkan hukum dalam esekusi putusan PHI menjadi faktor lambatnya pelaksanaan eksekusi tersebut. Dalam beberapa kasus, pengusaha yang kalah dalam persidangan tidak memiliki aset yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran, atau bahkan berada dalam situasi kepailitan. Hal ini sering kali membuat pekerja terjebak dalam ketidakpastian hukum yang berkepanjangan, di mana meskipun sudah ada putusan yang menguntungkan bagi pekerja, hak-hak mereka tetap tidak bisa dipenuhi. Keadaan ini mengindikasikan adanya celah dalam sistem peradilan yang perlu segera diatasi agar PHI tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen yang memastikan implementasi keputusan secara adil dan efektif.

Pembaharuan dalam sistem peradilan yang melibatkan peran serta lembaga lain, seperti Pengadilan Niaga, dalam proses eksekusi putusan PHI. Dengan kemampuan Pengadilan Niaga untuk menangani masalah keuangan perusahaan yang berujung pada kepailitan, diharapkan dapat tercipta mekanisme eksekusi yang lebih efektif dan efisien, yang tidak hanya memperhatikan kepentingan pengusaha, tetapi juga memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja. Penyesuaian aturan yang memprioritaskan hak-hak pekerja dalam hal eksekusi putusan PHI sangat penting untuk memastikan keadilan bagi pekerja, sehingga hubungan industrial di Indonesia bisa terwujud lebih harmonis dan seimbang antara pengusaha dan pekerja.

Pengusaha sering kali tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hak-hak

¹ Christina NM Tobing, "Menggagas Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Bingkai Ius Constituendum Sebagai Upaya Perwujudan Kepastian Hukum Dan Keadilan / Initiating an Industrial Relations Court in the Framework of Ius Constituendum As an Effort To Realize Legal Certainty and Jus," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 2 (2018): 297, <https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.297-326>.

pekerja, seperti upah yang tertunggak, pesangon, dan kompensasi lainnya². Proses eksekusi yang memerlukan biaya tinggi dan prosedur yang kompleks menambah kesulitan dalam menuntut pelaksanaan putusan, yang berujung pada ketidakpastian hukum bagi pihak yang berperkara. Rendahnya tingkat kepatuhan pengusaha juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan finansial perusahaan, yang sering kali mengakibatkan pengusaha enggan atau bahkan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya terhadap pekerja. Hal ini terutama terjadi pada perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, kepailitan, atau sedang dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Meskipun putusan PHI telah dikeluarkan dengan tegas, perusahaan yang tidak mampu membayar kewajiban sering kali menghindari eksekusi dengan berbagai alasan, termasuk dengan mengalihkan aset atau menyembunyikan informasi terkait keuangan mereka. Kondisi ini memperburuk ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh pekerja, yang seharusnya bisa mendapatkan hak-haknya berdasarkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Hambatan lain yang turut memperburuk pelaksanaan eksekusi adalah ketidakefektifan prosedur eksekusi yang berlaku, yang kadang kali terhambat oleh masalah administratif, teknis, dan kurangnya koordinasi antara lembaga terkait³. Meskipun PHI memiliki kekuatan hukum tetap dalam mengeluarkan keputusan, implementasi dari keputusan tersebut sering kali terhenti pada tahap eksekusi, sehingga hak-hak pekerja tidak terealisasi dengan baik.

Untuk mengatasi masalah eksekusi putusan, Pengadilan Niaga dapat dijadikan pilihan. Pengadilan Niaga memiliki prosedur yang lebih cepat dan efisien dalam menangani perkara yang melibatkan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Dalam hal ini, Pengadilan Niaga memiliki kapasitas untuk menangani masalah keuangan perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajiban hukum, sehingga memberikan kesempatan bagi pekerja untuk memperoleh hak-haknya secara lebih terjamin.

Sistem hukum yang ada saat ini memang belum sepenuhnya mampu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam eksekusi putusan PHI, terutama terkait dengan perusahaan yang mengalami kesulitan finansial. Pengadilan Niaga,

² Hansen Alandi and Dian Ety Mayasari, “Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Menyelesaikan Perselisihan Pekerja,” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 2 (2023): 31–51, <https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.70>.

³ Yani Nur Fatimah, “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Pemenuhan Hak Pekerja/Buruh Yang Di Putus Hubungan Kerja,” *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 2 (2015): 215, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2.4954>.

dengan kewenangannya dalam menangani kepailitan dan PKPU, dapat menjadi lembaga yang efektif dalam membantu menegakkan putusan PHI, sehingga hak-hak pekerja dapat dipenuhi meskipun perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Proses eksekusi putusan PHI melalui Pengadilan Niaga menjadi penting karena memberikan solusi terhadap masalah eksekusi yang tidak berjalan efektif. Dengan melibatkan Pengadilan Niaga, pekerja yang hak-haknya belum dibayar dapat memperoleh kepastian hukum yang lebih tinggi, karena Pengadilan Niaga dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tegas, seperti penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atau kepailitan, yang berdampak pada pengelolaan aset perusahaan untuk membayar utang, termasuk kewajiban terhadap pekerja⁴.

Pengadilan Niaga memberikan potensi untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih tinggi, tantangan lainnya adalah bagaimana mekanisme tersebut diterjemahkan dalam praktik untuk memastikan hak pekerja tetap menjadi prioritas. Dalam banyak kasus, perusahaan yang menghadapi kepailitan atau PKPU memiliki kewajiban yang lebih besar terhadap kreditor lain, seperti bank atau pemasok. Hal ini dapat menyebabkan hak-hak pekerja terabaikan atau tidak terpenuhi dengan tepat waktu, meskipun sudah ada keputusan dari Pengadilan Hubungan Industrial. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa dalam prosedur kepailitan, terdapat pengaturan yang mengutamakan pembayaran hak-hak pekerja, dengan memberikan mereka prioritas dalam pembagian aset perusahaan yang sedang dalam proses restrukturisasi atau pailit.

Sistem yang melibatkan Pengadilan Niaga dalam eksekusi putusan PHI harus dibarengi dengan pembaruan dalam regulasi yang memperjelas dan mengatur secara rinci hak pekerja dalam situasi seperti ini. Misalnya, perlu ada ketentuan yang mengatur dengan jelas bahwa hak pekerja atas upah, pesangon, dan kompensasi lainnya harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum klaim lain dipertimbangkan dalam pembagian aset perusahaan. Hal ini akan memberikan kepastian lebih besar bagi pekerja dalam menuntut hak-haknya melalui jalur hukum, serta memperkecil kemungkinan terjadinya ketidakadilan akibat perbedaan perlakuan antara pekerja dan kreditor lainnya dalam proses kepailitan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan eksekusi putusan PHI melalui Pengadilan Niaga dapat berjalan lebih efektif dan memberikan solusi yang adil bagi pekerja.

Meskipun Pengadilan Niaga menawarkan potensi untuk mempercepat dan

⁴ Herlina Herlina, Ilham Abbas, and Andi Risma, "Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2024): 1–14, <https://doi.org/10.56087/qawaninjh.v3i2.375>.

mempermudah eksekusi putusan PHI, implementasinya di lapangan masih ada tantangan. Konstruksi hukum yang mengatur eksekusi putusan PHI melalui Pengadilan Niaga perlu dianalisis secara mendalam untuk memastikan bahwa mekanisme ini berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan⁵. Sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia, perlu ada sinergi antara hukum hubungan industrial dan hukum niaga yang dapat memperkuat proses eksekusi putusan, mengurangi ketidakpastian, dan memastikan perlindungan hak pekerja.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran pengadilan Niaga dalam menyelesaikan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana Pengadilan Niaga dapat berperan dalam mempercepat eksekusi putusan PHI dan memberikan rekomendasi terkait perbaikan regulasi yang dapat mendukung implementasi eksekusi yang lebih adil dan efisien.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan berbagai putusan pengadilan yang relevan⁶. Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang menganalisis aturan hukum yang berlaku dalam konteks eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan peran Pengadilan Niaga. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mempelajari penerapan hukum dalam praktik eksekusi putusan PHI, khususnya yang melibatkan Pengadilan Niaga. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari studi pustaka, yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, serta keputusan-keputusan pengadilan yang relevan. Analisis terhadap data dilakukan dengan menggunakan teknik interpretasi hukum, yang bertujuan untuk mengidentifikasi konstruksi hukum yang dapat memperbaiki proses eksekusi putusan PHI melalui Pengadilan Niaga dan memberikan rekomendasi terkait perbaikan sistem hukum yang ada.

⁵ M. Hadi Shubhan, “Fenomena Hukum Pengajuan Kepailitan Terhadap Pengusaha Oleh Pekerja Karena Hak Pekerja Yang Tidak Dibayar Pengusaha,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 519, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2589>.

⁶ Irawansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022).

C. Hasil dan Pembahasan

Konstruksi hukum dalam eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang dilaksanakan melalui Pengadilan Niaga. Proses eksekusi putusan PHI seringkali menemui hambatan-hambatan baik teknis maupun administratif, yang berujung pada ketidakpastian bagi pekerja dalam memperoleh hak-haknya. Salah satu alasan utama adalah kesulitan dalam memaksa pengusaha untuk memenuhi kewajibannya, terutama dalam kasus-kasus di mana pengusaha mengalami masalah keuangan, seperti kepailitan atau kesulitan pembayaran upah dan kompensasi lainnya⁷.

Eksekusi putusan PHI juga dihadapkan pada kendala dalam hal penegakan hukum yang kurang efektif, mengingat sering kali pihak pengusaha tidak memiliki aset yang cukup untuk dijadikan jaminan⁸. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang menangani kepailitan atau perkara niaga lainnya, memegang peranan penting dalam melaksanakan eksekusi tersebut. Namun, tidak jarang terdapat ketidakselarasan antara keputusan yang dijatuhkan oleh PHI dan kemampuan Pengadilan Niaga dalam mengimplementasikan keputusan tersebut, mengingat karakteristik perkara kepailitan yang seringkali melibatkan pihak ketiga seperti kreditor dan pengelola aset perusahaan.

Ketidakselarasan antara putusan PHI dan eksekusi melalui Pengadilan Niaga sering kali terjadi karena adanya perbedaan fokus antara kedua lembaga peradilan tersebut. Pengadilan Hubungan Industrial lebih memfokuskan pada hak-hak pekerja dan memastikan pemenuhan kewajiban pengusaha terhadap pekerja, sementara Pengadilan Niaga lebih terfokus pada pengelolaan aset perusahaan yang sedang dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Ketika perusahaan menghadapi kepailitan, pihak pengusaha sering kali berusaha untuk meminimalkan kerugian dengan merestrukturisasi utang atau membagi aset sesuai dengan prioritas yang ditentukan oleh kreditor, tanpa memperhitungkan dengan cermat hak-hak pekerja yang tertunda. Hal ini dapat memperburuk ketidakpastian yang dihadapi pekerja dalam menuntut hak-haknya meskipun sudah ada keputusan hukum yang menguntungkan.

Perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga agar dapat tercipta mekanisme eksekusi yang lebih harmonis.

⁷ Hudyarto Hudyarto, "Pertanggungjawaban Putusan Pailit Perseroan Terbatas," *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021): 91–106, <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.444>.

⁸ Pekerja Di Perusahaan, "Efektivitas Eksekusi Terhadap Pengusaha Yang Tidak Membayar Pesangon Pekerja Di Perusahaan," *Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022).

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memberikan perlindungan lebih besar bagi pekerja dalam proses kepailitan, seperti memastikan bahwa hak-hak pekerja menjadi klaim prioritas yang harus dibayar sebelum kewajiban lainnya dipenuhi. Dengan adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai prioritas hak pekerja dalam proses hukum kepailitan, diharapkan eksekusi putusan PHI dapat lebih efektif dan pekerja dapat memperoleh hak-haknya dengan lebih cepat, bahkan dalam keadaan perusahaan mengalami kesulitan finansial.

Di sisi lain, kurangnya koordinasi antara lembaga peradilan yang menangani masalah ketenagakerjaan dan yang menangani perkara niaga turut memperburuk efisiensi pelaksanaan eksekusi putusan. Tanpa adanya mekanisme yang jelas dan tegas antara kedua lembaga tersebut, pekerja sering kali terjebak dalam ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Untuk itu, diperlukan adanya upaya reformasi dalam sistem peradilan yang melibatkan integrasi antara Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga, agar proses eksekusi putusan dapat berjalan dengan lebih efisien, transparan, dan adil bagi pekerja yang berhak menerima kompensasi dan hak-haknya.

Mekanisme eksekusi putusan PHI belum sepenuhnya berjalan efektif. Ketidakpastian dalam hal prosedur eksekusi menjadi salah satu faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak pekerja. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif melalui Pengadilan Niaga, yang memiliki prosedur lebih efisien dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan masalah keuangan perusahaan. Pengadilan Niaga, dengan wewenangnya dalam hal kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), dapat menjadi lembaga yang mempercepat dan mempermudah proses eksekusi putusan PHI, khususnya yang melibatkan perusahaan yang tidak mampu membayar kewajiban terhadap pekerja⁹.

Pengadilan Niaga memiliki prosedur yang lebih efisien dalam menangani masalah keuangan perusahaan, hal ini tidak selalu menjamin pemenuhan hak-hak pekerja secara maksimal. Salah satu tantangan besar adalah bahwa dalam banyak kasus, pekerja sering kali harus bersaing dengan kreditor lain dalam upaya untuk mendapatkan klaim mereka. Dalam konteks kepailitan, utang yang dimiliki perusahaan tidak hanya terbatas pada pekerja, tetapi juga mencakup berbagai pihak lain yang juga berhak untuk menerima pembayaran. Hal ini menjadikan pekerja terjebak dalam posisi yang kurang menguntungkan, di mana hak-hak mereka sering kali tertunda atau bahkan

⁹ Hendri Jayadi, *Buku Ajar Hukum Kepailitan Dan Penunadaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2021).

terabaikan.

Perlu adanya kebijakan yang lebih jelas dan terstruktur terkait dengan hak-hak pekerja dalam proses kepailitan, agar pekerja tidak kehilangan hak-haknya hanya karena keterbatasan aset perusahaan yang sedang dalam kondisi pailit. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan memberikan prioritas terhadap hak-hak pekerja dalam pembagian aset kepailitan, serta memastikan adanya jaminan hukum yang kuat agar hak-hak tersebut tidak tergeser oleh klaim pihak lain. Dengan demikian, diharapkan pengadilan dapat mempercepat eksekusi putusan PHI dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak pekerja dalam menghadapi situasi keuangan yang buruk pada perusahaan.

Potensi Pengadilan Niaga dalam eksekusi putusan PHI sangat besar, implementasi sistem ini tetap menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi teknis maupun prosedural. Salah satunya adalah kebutuhan akan koordinasi yang lebih baik antara Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga. Proses eksekusi yang melibatkan dua lembaga pengadilan ini memerlukan sinergi yang lebih baik agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat memperlambat proses eksekusi.

Proses PKPU yang dijalankan di Pengadilan Niaga juga memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja tetap menjadi prioritas dalam setiap restrukturisasi yang dilakukan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu perubahan dalam regulasi yang mengatur eksekusi putusan PHI, agar mekanisme yang ada dapat lebih responsif dan efektif. Dalam hal ini, perlu ada pembaruan dalam aturan mengenai prioritas pembayaran bagi pekerja dalam konteks PKPU atau kepailitan perusahaan, yang harus lebih mengakomodasi kepentingan pekerja¹⁰.

Dilihat dari segi praktis, peran Pengadilan Niaga untuk eksekusi putusan PHI seharusnya dilengkapi dengan prosedur yang lebih jelas mengenai mekanisme pembayaran hak-hak pekerja yang tertunggak. Hal ini juga akan memerlukan peran aktif dari lembaga-lembaga terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja dan serikat pekerja, untuk memastikan bahwa proses eksekusi dapat berjalan dengan baik dan pekerja mendapatkan hak-haknya. Penguatan posisi pekerja sebagai kreditor preferen dalam sistem hukum niaga dapat memberikan jaminan lebih kuat bahwa hak-hak mereka akan dipenuhi meskipun perusahaan menghadapi masalah keuangan.

Hambatan prosedural yang terjadi dalam proses eksekusi perlu diatasi dengan

¹⁰ Rebecca Purba et al., “Keabsahan Permohonan Pailit Yang Diajukan Buruh Terhadap Perusahaan Terkait Pemenuhan Haknya,” *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 259–69, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1814>.

mengurangi birokrasi yang ada dan meningkatkan kapasitas aparat hukum yang terlibat dalam proses ini. Pengadilan Niaga perlu diberi otoritas yang lebih besar dalam menangani sengketa yang melibatkan hubungan industrial, terutama dalam kasus yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak pekerja, seperti upah dan pesangon. Ini akan mempercepat proses penyelesaian dan mengurangi ketidakpastian hukum yang sering dihadapi oleh pekerja.

Penting juga untuk mencatat bahwa sistem yang ada saat ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah kepatuhan pengusaha terhadap putusan pengadilan. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap pengusaha yang gagal memenuhi kewajibannya, serta adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tersebut. Dalam hal ini, peran Pengadilan Niaga yang lebih aktif dalam mengawasi proses pembayaran hak-hak pekerja akan sangat membantu mempercepat penyelesaian masalah ini.

Meskipun ada upaya untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi atau konsiliasi, tidak jarang penyelesaian tersebut tidak berhasil, sehingga menyebabkan pihak pekerja harus membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial. Namun, setelah putusan diberikan, eksekusi seringkali tidak dapat dilaksanakan dengan efektif karena faktor-faktor di luar kontrol pengadilan. Oleh karena itu, penyelesaian melalui Pengadilan Niaga menjadi alternatif yang lebih realistik dalam menyelesaikan eksekusi putusan PHI, khususnya yang terkait dengan masalah finansial perusahaan.

Diperlukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap mekanisme hukum yang ada, baik dalam sistem Pengadilan Hubungan Industrial maupun Pengadilan Niaga, untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja terlindungi secara maksimal¹¹. Hal ini termasuk penguatan prosedur eksekusi dan revisi regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan pekerja dalam konteks kepailitan dan PKPU. Diperlukan juga kerjasama antara berbagai lembaga hukum untuk mempercepat dan mempermudah proses eksekusi yang selama ini terhambat oleh berbagai kendala teknis dan administratif.

Sistem hukum yang lebih baik dalam hal eksekusi putusan PHI dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Indonesia. Jika proses eksekusi dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan transparan, maka akan

¹¹ Maura Merala Harahap, "Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Karyawan / Buruh Akibat Tidak Dieksekusinya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Kasus Putusan No . 20 / Pdt . Sus - Pkpu / 2019 / Pn Niaga Mdn," *Jurnal Law of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum I*, no. I (2021): 68–75.

tercipta kepastian hukum yang lebih baik, tidak hanya bagi pekerja tetapi juga bagi pengusaha yang memerlukan kejelasan dalam menjalankan kewajiban mereka. Sebagai bagian dari upaya reformasi hukum, Pengadilan Niaga dapat menjadi lembaga yang memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak pekerja tidak hanya dilindungi dalam teori, tetapi juga dalam praktik yang dapat diterima oleh semua pihak.

Pemahaman yang lebih baik mengenai sinergi antara Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga, serta langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk memperbaiki eksekusi putusan, akan menjadi langkah maju dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efisien. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari hukum, yaitu menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

D. Kesimpulan

Pengadilan Niaga memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), terutama dalam menghadapi hambatan teknis dan prosedural yang seringkali menghambat pelaksanaan putusan PHI. Pengadilan Niaga menawarkan prosedur yang lebih cepat dan efisien, khususnya dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan masalah keuangan perusahaan, seperti kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam implementasi sistem ini, seperti perlunya koordinasi yang lebih baik antara Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga, serta pembaruan regulasi untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja diprioritaskan dalam proses eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan sistem hukum yang mengatur eksekusi putusan PHI melalui Pengadilan Niaga untuk menciptakan mekanisme yang lebih adil, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pekerja, serta untuk mengurangi ketidakpastian dan ketidakadilan yang sering terjadi dalam eksekusi putusan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Alandi, Hansen, and Dian Ety Mayasari. "Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Menyelesaikan Perselisihan Pekerja." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 2 (2023): 31–51. <https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.70>.
- Fatimah, Yani Nur. "Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Pemenuhan Hak Pekerja/Buruh Yang Di Putus Hubungan Kerja." *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 2 (2015): 215. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2.4954>.

Harahap, Maura Meraldia. "Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Karyawan / Buruh Akibat Tidak Dieksekusinya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Kasus Putusan No . 20 / Pdt . Sus - Pkpu / 2019 / Pn Niaga Mdn.)" *Jurnal Law of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum I*, no. I (2021): 68–75.

Hendri Jayadi. *Buku Ajar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2021.

Herlina, Herlina, Ilham Abbas, and Andi Risma. "Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum 3*, no. 2 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i2.375>.

Hudyarto, Hudyarto. "Pertanggungjawaban Putusan Pailit Perseroan Terbatas." *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021): 91–106. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.444>.

Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.

Perusahaan, Pekerja Di. "Efektivitas Eksekusi Terhadap Pengusaha Yang Tidak Membayar Pesangon Pekerja Di Perusahaan." *Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022).

Rebecca Purba, Safina Nabila Fikrie, Diva Salsabila Ferdiansyah, Angelia Carla, Nafisa Verlee Ameeralia, and Andriyanto Adhi Nugroho. "Keabsahan Permohonan Pailit Yang Diajukan Buruh Terhadap Perusahaan Terkait Pemenuhan Haknya." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 259–69. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1814>.

Shubhan, M. Hadi. "Fenomena Hukum Pengajuan Kepailitan Terhadap Pengusaha Oleh Pekerja Karena Hak Pekerja Yang Tidak Dibayar Pengusaha." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 519. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2589>.

Tobing, Christina NM. "Menggagas Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Bingkai Ius Constituendum Sebagai Upaya Perwujudan Kepastian Hukum Dan Keadilan / Initiating an Industrial Relations Court in the Framework of Ius Constituendum

As an Effort To Realize Legal Certainty and Jus.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 2 (2018): 297. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.297-326>.